

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH (SAPD), PEMAHAMAN AKUNTANSI DAN KETAATAN
PERATURAN PERUNDANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(Studi pada BPKD Kabupaten Ciamis)**

ARTIKEL

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Menempuh Ujian Sidang Sarjana Strata Satu



oleh
MUHAMAD YUNUS RAMDANI
3403150143

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS GALUH
TAHUN 2022

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH (SAPD), PEMAHAMAN AKUNTANSI DAN KETAATAN
PERATURAN PERUNDANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(Studi pada BPKD Kabupaten Ciamis)**

Oleh,

oleh

**MUHAMAD YUNUS RAMDANI
3403150143**

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini meliputi : (1) Bagaimana pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)? (2) Bagaimana pengaruh pemahaman akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Daerah? (3) Bagaimana Pengaruh Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Daerah? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Daerah. (2) Pengaruh pemahaman akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Daerah. (3) Pengaruh Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Daerah Kabupaten Ciamis. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode *deskriptif* dengan pendekatan kuantitatif. Sedangkan untuk menganalisis data yang diperoleh digunakan Analisis Koefisien Korelasi, Analisis Koefisien Determinasi, Analisis Koefisien Korelasi Berganda, Uji Hipotesis menggunakan Uji Signifikan (Uji t dan Uji F). Hasil dari penelitian dan pengolahan data menunjukkan bahwa. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Daerah. Artinya jika Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) baik, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) juga akan baik. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan oleh peneliti dimana sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) berpengaruh pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Artinya jika Pemahaman akuntansi baik, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) juga akan baik. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan oleh peneliti dimana pemahaman akuntansi berpengaruh pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Ketaatan terhadap peraturan perundangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Daerah Kabupaten Ciamis. Artinya jika ketaatan terhadap peraturan perundangan baik, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) juga akan baik. Hasil penelitian ini

mendukung hipotesis yang diajukan oleh peneliti dimana ketaatan peraturan perundangan berpengaruh pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) dipengaruhi secara signifikan oleh sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD), pemahaman akuntansi, dan ketaatan peraturan perundangan, artinya jika semakin baik sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD), pemahaman akuntansi, dan ketaatan peraturan perundangan, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) juga semakin baik, begitu pula sebaliknya. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan oleh peneliti dimana sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD), pemahaman akuntansi, dan ketaatan peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Daerah Kabupaten Ciamis

II. Daftar Pustaka

Anthony dan Govindajaran, 2005. *Manajemen Control System*, edisi 11, buku 2, penerjemah: Drs. F.X. Kurniawan Tjakrawala, Msi, Ak. Dan Krista, SE, Ak. Salemba Empat, Jakarta.

Belkaoui, Ahmed Riahi, 2006. *Teori Akuntansi*, Edisi Kelima, Terjemahan Ali

Akbar Yulianto, Risnawati Dermauli, Salemba Empat, Jakarta.

BPKP, 2002. *Diskusi tentang Akuntabilitas*, www.bpkp.go.id

Darwanis dan Sephi Chairunnisa, 2013. “Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”, *Jurnal telaah & riset akuntansi*, Vol. 6, Nomor 2, Hal 150-174.

Fatmala, 2014. “ Pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi, dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (pada skpd kabupaten bengkulutengah)”. *Skripsi*. Universitas Bengkulu, Bengkulu.

Ghozali, Imam, 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS19*, edisi kelima, Universitas Diponegoro, Semarang.

Halim, Abdul, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, 2014. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi dan Ujian Komprehensif Program Strata Satu*, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.

Instruksi Presiden RI Nomor 7, 1999. “Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”.

LAN, BPKP, 2000. *Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.

